

Pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno tentang Islam dan Negara: Kritik dalam Konteks Keindonesiaan Modern

Sholahul Robbani Hidayat

UIN Sunan Ampel Surabaya

robbyhidayat652@gmail.com

Abstrak: Hubungan antara Islam dan negara merupakan isu sentral dalam sejarah intelektual Indonesia. Artikel ini membandingkan dan menganalisis pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno mengenai relasi antara agama dan kenegaraan dalam kerangka pembentukan identitas keindonesiaan modern. Ahmad Hasan direpresentasikan sebagai tokoh yang menekankan kepatuhan pada teks syariat sebagai dasar normatif kehidupan politik, sedangkan Soekarno ditampilkan sebagai perumus nasionalisme yang merumuskan Pancasila sebagai wadah pluralitas dan kohesi kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif dan analisis kritis-normatif, dengan memanfaatkan kerangka teoretis Post-Islamism (Asef Bayat) dan Public Religion (José Casanova) untuk membaca relevansi gagasan kedua tokoh dalam konteks modernitas, demokrasi, dan pluralisme. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno memberikan kontribusi penting—baik sebagai sumber normatif maupun ideologis—yang saling melengkapi dan kadang bertemu pada ketegangan konseptual. Artikel ini menempatkan perbedaan dan persilangan gagasan tersebut sebagai bahan refleksi produktif, dan mengakhiri diskusi dengan pelajaran normatif mengenai keterbatasan manusiawi dalam berpikir serta pentingnya belajar dari perbedaan untuk membangun paradigma keindonesiaan yang lebih inklusif dan adaptif.

Kata Kunci: *Ahmad Hasan, Soekarno, Pemikiran, Islam, Negara.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Islam dan negara merupakan salah satu perdebatan paling penting dalam sejarah intelektual Islam, baik dalam konteks global maupun Indonesia. Sejak awal abad ke-20, wacana mengenai bagaimana Islam seharusnya berperan dalam pembentukan sistem kenegaraan modern terus menjadi pusat perhatian para pemikir Muslim. Pertanyaan mendasar yang selalu muncul adalah apakah negara harus didirikan atas dasar agama, ataukah sebaliknya, negara perlu bersifat netral terhadap agama namun tetap menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa. Dalam lintasan sejarah intelektual Indonesia, dua figur besar menonjol dalam percaturan ide ini, yaitu Ahmad Hasan sebagai tokoh modernis Persatuan Islam (Persis) dan Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan sekaligus pemikir nasionalis sekuler. Keduanya merepresentasikan dua arus besar dalam perdebatan tentang relasi Islam dan negara: Islamisme normatif yang menuntut penerapan syariat Islam dalam kehidupan

bernegara, dan sekularisme kebangsaan yang menekankan pemisahan formal antara agama dan politik.

Ahmad Hasan dan Soekarno sama-sama hidup di tengah situasi kolonial yang menekan dan dalam atmosfer intelektual yang sarat dengan semangat pembaruan. Ahmad Hasan mengusung pandangan legalistik dan skriptural, menegaskan bahwa syariat merupakan satu-satunya dasar yang sah bagi tatanan sosial dan politik. Sebaliknya, Soekarno berupaya merumuskan nasionalisme yang mempersatukan semua golongan dengan menempatkan agama sebagai sumber moral, bukan fondasi struktural negara. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun kemerdekaan dan keadilan sosial, perbedaan metodologis dan epistemologis mereka menciptakan dua arah pemikiran yang berbeda tajam. Keduanya juga berangkat dari kesadaran historis yang sama—bahwa Islam dan politik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia—namun menghasilkan sintesis konseptual yang berlawanan.

Kendati memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan wacana Islam dan kebangsaan, pemikiran kedua tokoh tersebut tidak terlepas dari keterbatasan. Gagasan Ahmad Hasan yang berorientasi pada penerapan hukum Islam menunjukkan kekakuan terhadap kenyataan sosial-politik Indonesia yang majemuk. Pemikiran semacam itu cenderung mengabaikan fakta pluralitas agama dan budaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Sementara itu, gagasan Soekarno tentang pemisahan agama dan negara, meskipun dilandasi semangat inklusivitas dan nasionalisme, justru berpotensi menyingkirkan dimensi moral dan spiritual dari ruang publik. Ketika agama direduksi menjadi sekadar sumber etika sosial tanpa kekuatan politis, potensi transformasi moral dalam kehidupan berbangsa menjadi melemah. Dengan demikian, baik legalisme keagamaan Ahmad Hasan maupun sekularisme politik Soekarno sama-sama menghadirkan problem baru dalam konteks modernitas Indonesia.

Keterbatasan konseptual kedua tokoh tersebut semakin tampak ketika wacana keagamaan dan kenegaraan dihadapkan pada dinamika globalisasi, demokrasi, dan pluralisme yang menandai abad ke-21. Ide Ahmad Hasan yang sangat tekstual menjadi sulit diterapkan dalam kerangka negara bangsa modern yang menuntut toleransi, kesetaraan, dan kebebasan beragama. Sementara itu, sekularisme Soekarno yang menempatkan agama di luar struktur negara menghadapi tantangan ketika religiusitas masyarakat Indonesia justru semakin meningkat di ruang publik. Dalam konteks ini, kedua gagasan tersebut perlu dikaji ulang secara kritis untuk melihat sejauh mana relevansinya dapat dipertahankan atau harus direkonstruksi. Kajian seperti ini penting agar diskursus Islam dan negara tidak terjebak dalam dikotomi lama antara Islamisme dan sekularisme, tetapi bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas kontemporer.

Masalah pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk keterbatasan pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno dalam menjawab persoalan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia modern. Dalam konteks politik kontemporer, perdebatan seputar penerapan syariat, relasi agama dan negara, serta moralitas publik masih terus berlangsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa warisan intelektual

keduanya belum sepenuhnya mampu memberikan solusi konseptual yang relevan terhadap tantangan zaman. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi akademik terhadap dasar pemikiran keduanya, baik dari aspek historis, teologis, maupun ideologis, agar dapat ditemukan model hubungan agama dan negara yang lebih kontekstual dengan kondisi sosial-politik Indonesia kini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif dan analisis kritis-normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar sosial, politik, dan intelektual yang membentuk pandangan Ahmad Hasan dan Soekarno, sedangkan pendekatan komparatif diterapkan untuk menganalisis perbedaan epistemologis dan orientasi ideologis antara keduanya. Selain itu, pendekatan kritis-normatif berfungsi untuk menilai relevansi pemikiran mereka dalam konteks modernitas, demokrasi, dan pluralisme. Sebagai pisau analisis, penelitian ini mengadopsi dua kerangka teoretis utama yaitu *Post Islamisme Theory* yang dikemukakan oleh Asef Bayat, dan *Public Religion theory* sebagaimana dirumuskan oleh José Casanova. Teori *Post-Islamisme* digunakan untuk menjelaskan transformasi paradigma politik Islam dari pendekatan legalistik menuju praksis sosial yang lebih terbuka dan demokratis. Sementara *Public Religion* memberikan perspektif bahwa agama dapat berperan aktif dalam ruang publik tanpa harus menjadi ideologi negara. Kedua teori ini memungkinkan pembacaan baru terhadap keterbatasan pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno dengan tetap menghormati konteks historis keduanya.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan studi pemikiran Islam di Indonesia. Kajian ini tidak bermaksud mendiskreditkan peran Ahmad Hasan dan Soekarno, melainkan menempatkan gagasan mereka secara proporsional dalam konteks zamannya serta menguji daya tahan konseptualnya di tengah perubahan sosial-politik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas perspektif dalam memahami relasi Islam dan negara, dengan menunjukkan bahwa baik paradigma Islamisme normatif maupun sekularisme kebangsaan memiliki keterbatasan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru yang lebih integratif, di mana agama diposisikan sebagai kekuatan moral publik dalam kerangka negara demokratis yang pluralistik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana rekonstruksi pemikiran Islam politik Indonesia yang selama ini masih terjebak dalam dikotomi lama antara agama dan negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentukan paradigma keislaman yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, kebinekaan, dan kemanusiaan universal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat retrospektif terhadap dua pemikiran klasik, tetapi juga prospektif dalam menawarkan arah konseptual baru bagi hubungan harmonis antara Islam dan negara di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dua Arah Pandangan Islam dan Negara dalam Pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno

Persinggungan antara kolonialisme, kebangkitan Islam modern, dan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 menghasilkan dua mazhab utama mengenai hubungan antara Islam dan negara.¹ Mazhab pertama bersifat teologis-normatif, yang berupaya menjadikan hukum Islam sebagai landasan pembentukan tatanan sosial dan politik. Mazhab kedua bersifat nasional-sekuler, yang memposisikan Islam sebagai sumber nilai-nilai moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa tanpa harus menjadi dasar hukum negara.² Kedua pendekatan ini sangat terwakili dalam gagasan Ahmad Hasan dan Soekarno, dua tokoh penting yang sama-sama berjuang untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme, tetapi mengambil jalur konseptual yang berbeda dalam menafsirkan Islam dan negara.

Ahmad Hasan, seorang pemikir terkemuka dalam organisasi Persatuan Islam (Persis), menekankan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif (*kaffah*) dan tidak dapat dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.³ Menurutnya, hukum Tuhan adalah sumber kedaulatan sejati, sementara hukum manusia bersifat relatif dan terbatas. Dalam karya seminalnya, *Islam dan Kebangsaan*, Hasan menjelaskan bahwa nasionalisme dalam Islam harus tunduk pada nilai-nilai ketuhanan, bukan sebaliknya.⁴ Ia bahkan secara terbuka mengkritik pandangan Sukarno bahwa Islam hanyalah kekuatan moral, bukan hukum yang mengatur kehidupan politik.⁵

Menurut Hasan, pandangan semacam itu "melemahkan Islam", artinya agama ini menjadi terlalu fleksibel terhadap sentimen nasionalis, sehingga kehilangan integritas prinsipnya.⁶ Baginya, ketika Islam tidak lagi menjadi sumber kedaulatan dan hukum, makna spiritual dan moralnya akan terkikis oleh kepentingan politik manusia.⁷

Kritik Hasan bukan bersumber dari permusuhan pribadi, melainkan dari keprihatinan intelektual terhadap fenomena sekularisasi dalam gerakan perjuangan, yang mulai menafsirkan Islam secara pragmatis.⁸ Hasan khawatir jika nasionalisme menjadi landasan utama tanpa landasan ketuhanan, bangsa Indonesia akan kehilangan orientasi moralnya. Ia meyakini bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih ketika manusia tunduk pada hukum Tuhan.⁹ Oleh karena itu, bagi Hasan, Islam bukan sekadar identitas spiritual, melainkan juga pedoman sosial dan politik yang harus diwujudkan dalam struktur negara.¹⁰

Berbeda dengan Hasan, Soekarno memahami Islam sebagai kekuatan spiritual dan etika sosial yang mendorong pembebasan manusia dari penindasan kolonial.¹¹ Melalui tulisannya *Api Islam*, Soekarno memaknai Islam bukan hanya sebagai hukum, melainkan sebagai "api" yang membangkitkan semangat perjuangan dan kemerdekaan.¹² Bagi Soekarno, hakikat Islam adalah pembebasan manusia dari struktur ketidakadilan—baik kolonialisme, feodalisme, maupun fanatisme agama.¹³ Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, Soekarno menolak pembentukan negara Islam karena ia yakin hal itu akan memecah belah persatuan bangsa.¹⁴ Ia berpendapat bahwa nilai-nilai Islam seperti

keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dapat dihidupkan dalam Pancasila tanpa harus menjadikan agama sebagai ideologi politik.¹⁵

Melalui pandangan ini, Soekarno ingin mengembalikan Islam pada fungsi moral universalnya: membimbing umat manusia menuju keadilan sosial, alih-alih membatasi kehidupan publik melalui penafsiran hukum yang kaku.¹⁶ Gagasan ini juga muncul sebagai respons terhadap kondisi umat Islam yang terpecah dan terbelakang pada masa penjajahan.¹⁷ Soekarno meyakini bahwa kekuatan Islam yang sesungguhnya terletak pada semangat pembebasannya, bukan pada simbol-simbol atau bentuk formal kenegaraannya.¹⁸ Dengan memposisikan Islam sebagai sumber moralitas dan inspirasi bagi umat manusia, ia berusaha menjaga agar agama tetap hidup dalam jiwa bangsa tanpa kehilangan relevansinya dengan modernitas.¹⁹

Dari kedua mazhab pemikiran ini, jelaslah bahwa *Ahmad Hasan dan Soekarno berbeda bukan hanya dalam bidang teoritis, tetapi juga dalam orientasi ideologis dan visi sosial.*²⁰ Hasan menekankan keunggulan hukum Tuhan sebagai bentuk kesempurnaan iman dan jaminan keadilan, sementara Soekarno menyampaikan transmisi kemanusiaan dan persatuan bangsa sebagai manifestasi nilai-nilai Islam dalam praktik sosial.²¹ Perbedaan ini mencerminkan dua bentuk Islam yang ada di Indonesia pada awal abad ke-20: yang satu bersifat tekstual-normatif, yang lain kontekstual-humanistik.²²

Meskipun demikian, keduanya bertemu dengan tujuan moral yang sama: memperjuangkan martabat manusia dan kemerdekaan nasional. Hasan memperjuangkan kebebasan manusia dari penindasan dengan tunduk pada hukum Tuhan, sementara Soekarno memperjuangkan kebebasan manusia untuk menjalankan ajaran Tuhan tanpa penindasan.²³ Dengan demikian, perbedaan antara keduanya bukanlah konflik antara iman dan kebangsaan, melainkan dialog etis antara spiritualitas dan rasionalitas, antara hukum dan kemanusiaan.²⁴

Dari dialog ini, kita dapat memahami bahwa gagasan Islam dan negara dalam konteks Indonesia modern tidak harus dipahami secara biner. Islam dapat hadir sebagai sumber moralitas publik yang memberikan arahan etis bagi bangsa, sementara negara dapat menjadi forum rasional yang menjamin keadilan dan kebebasan bagi warganya.²⁵

*Debat Hasan dan Soekarno dengan demikian bukanlah debat untuk memenangkan ideologi tertentu, melainkan pencarian bersama akan masyarakat yang adil, beriman, dan beradab.*²⁶

Faktor Historis dan Intelektual Pembentukan Pandangan Ahmad Hasan dan Soekarno

Pemikiran tentang agama dan nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20 tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial politik era kolonial dan bangkitnya gelombang modernisme Islam di dunia Muslim.¹ Periode ini ditandai dengan tumbuhnya kesadaran di kalangan umat Islam akan keterbelakangannya dibandingkan dengan Barat, serta upaya untuk menafsirkan kembali ajaran agama secara lebih logis dan sesuai dengan kebutuhan zaman.² Arus modernisme Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh memiliki dampak besar pada diskusi

keagamaan di Hindia Belanda.³ Dari sana, muncul generasi intelektual Muslim Indonesia yang berupaya untuk mengatasi tantangan modernitas dan kolonialisme melalui berbagai pendekatan, termasuk Ahmad Hasan dan Soekarno.

Ahmad Hasan tumbuh dalam lingkungan sosial yang sangat religius dan sangat dipengaruhi oleh semangat pemurnian Islam.⁴ Pendidikan tradisionalnya dan pergaulannya dengan jaringan ulama reformis membuatnya menekankan pentingnya kemurnian tauhid dan kepatuhan terhadap hukum ilahi.⁵ Ia terlibat erat dengan gerakan Kaum Muda di Singapura dan kemudian menjadi penggerak utama gerakan Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada tahun 1920-an.⁶ Melalui Persis, Hasan mengembangkan gagasan bahwa Islam harus dibersihkan dari praktik takhayul dan ajaran sesat, serta dari pengaruh sekularisme yang semakin besar di kalangan nasionalis.⁷

Secara intelektual, Hasan sangat terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, khususnya dalam rasionalisasi hukum Islam dan gagasan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Namun, berbeda dengan Abduh yang membuka ruang kompromi antara Islam dan modernitas, Hasan menekankan bahwa modernitas harus tunduk pada prinsip tauhid.⁹ Pandangan ini menjadi landasan sikapnya terhadap negara: bahwa nasionalisme adalah sah asalkan tidak mengabaikan kedaulatan Tuhan.¹⁰ Dengan demikian, akar sejarah pemikiran Hasan terletak pada pergulatan intelektual antara Islam reformis dan nasionalisme sekuler di era kolonial.

Di sisi lain, Sukarno dibentuk oleh lingkungan sosial yang beragam dan modern. Ia berasal dari keluarga nasionalis Jawa, mengenyam pendidikan Belanda, dan tumbuh di tengah persinggungan antara humanisme Barat dan semangat Renaisans Timur.¹³ Berbeda dengan Hasan, yang berasal dari tradisi ulama, Sukarno tumbuh sebagai seorang intelektual sekuler yang memandang agama dari perspektif sosial-politik. Dalam *Nationalism, Islamism, and Marxism* (1926), Sukarno menyatakan bahwa ketiga kekuatan ini harus bersatu untuk melawan kolonialisme, bukan untuk saling mengecualikan.¹⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa sejak awal Sukarno tidak mengingkari Islam, tetapi berusaha memposisikannya sebagai kekuatan moral yang setara dengan semangat nasionalisme.¹⁵

Pengalaman kolonial juga sangat membentuk cara Soekarno menafsirkan Islam. Ia melihat bagaimana umat Islam sering dijadikan alat legitimasi oleh penguasa kolonial dan feodal.¹⁶ Oleh karena itu, ia menolak penggunaan agama untuk memperkuat struktur kekuasaan yang menindas. Melalui pemikiran seperti itu, Soekarno membangun konsep Islam yang membebaskan dan kontekstual, yakni Islam yang mengentaskan manusia dari penindasan sosial tanpa harus mendirikan negara agama.¹⁷ Bagi Soekarno, esensi Islam adalah rahmatan lil 'alamin, dan keadilan sosial adalah manifestasi tertinggi iman di ruang publik.¹⁸

Secara historis, perbedaan latar belakang intelektual Hasan dan Soekarno sangat menentukan arah pemikiran mereka. Hasan mewakili tradisi Islam puritan yang sangat dipengaruhi oleh semangat Salafi dan reformasi hukum Islam, sementara Soekarno mewakili tradisi modernis-nasionalis yang menekankan pembebasan sosial dan

kebebasan berpikir.¹⁹ Namun, keduanya menentang kolonialisme dan berupaya menemukan bentuk ideal partisipasi Islam dalam kehidupan berbangsa.²⁰

Secara intelektual, kedua tokoh ini sebenarnya memiliki kesamaan mendasar: keduanya menolak kemapanan dan berupaya menghidupkan kembali dinamika Islam di tengah modernitas.²¹ Hasan melakukannya dengan menjunjung tinggi kemurnian syariat, sementara Soekarno melakukannya dengan menafsirkan Islam sebagai etika sosial yang membebaskan.²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor historis seperti kolonialisme, modernisme Islam, dan nasionalisme, serta faktor-faktor intelektual seperti pendidikan, membaca, dan jaringan pemikiran, merupakan fondasi utama yang membentuk pandangan mereka tentang hubungan antara Islam dan negara.²³

Kontribusi Pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno terhadap Wacana Keislaman dan Kebangsaan di Indonesia Modern

Pemikiran Ahmad Hasan dan Sukarno telah menjadi dua pilar utama dalam perdebatan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia.¹ Mereka menawarkan pandangan yang berbeda tetapi saling melengkapi: Ahmad Hasan menekankan keutamaan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan etika politik, sementara Sukarno menyoroti aspek kemanusiaan dan pembebasan sosial dalam penerapan ajaran Islam.² Dalam evolusi diskusi Islam modern di Indonesia, perbedaan-perbedaan ini tidak lagi dilihat sebagai konflik ideologis, tetapi sebagai dua sumber inspirasi yang membentuk identitas keagamaan, rasional, dan nasionalis Islam Indonesia.³

Kontribusi Ahmad Hasan tercermin dalam munculnya tradisi Islam yang meneguhkan kesadaran normatif di ruang publik.⁴ Melalui gagasannya, generasi-generasi berikutnya, khususnya kaum modernis, didorong untuk menggunakan syariat sebagai pedoman moral dan hukum sosial tanpa terjerumus ke dalam fanatisme politik.⁵ Ajaran-ajaran Hasan tentang tauhid sosial memotivasi banyak intelektual Muslim pasca-kemerdekaan untuk memandang agama sebagai landasan etika keadilan, bukan sebagai instrumen kekuasaan. Bahwa kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan yang mengatur perilaku masyarakat.⁷ Dengan demikian, warisan intelektual Hasan tetap berurat berakar dalam semangat pembaruan Islam yang mengutamakan ketaatan, kesederhanaan, dan moralitas sosial.⁸

Di sisi lain, Sukarno memberikan kontribusi besar dalam membentuk diskusi tentang nasionalisme Indonesia yang pluralistik dan inklusif.⁹ Ia berhasil menyampaikan konsep Islam dalam bahasa universal kemanusiaan yang dapat diterima oleh semua kalangan.¹⁰ Melalui Pancasila, Sukarno mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan gotong royong ke dalam struktur negara yang terbuka.¹¹ Pandangan ini mendorong munculnya Islam publik, yaitu Islam yang aktif di ranah sosial tanpa menjadi ideologi politik yang eksklusif.¹² Gagasan ini selaras dengan teori agama publik José Casanova, di mana agama tetap signifikan dalam ranah publik modern sambil mempertahankan otonominya sebagai sumber moral.¹³

Dalam konteks kekinian, perpaduan pemikiran Hasan dan Soekarno dapat dipandang sebagai refleksi wacana pasca-Islamisme yang berkembang di dunia Islam modern.¹⁴ Konsep pasca-Islamisme, sebagaimana dijelaskan Asef Bayat, menekankan perlunya penyajian nilai-nilai Islam melalui pendekatan demokratis dan sosial, alih-alih melalui struktur dan legalisme.¹⁵ Dalam kerangka ini, gagasan Hasan yang berfokus pada syariat, dan penekanan Soekarno pada nasionalisme, dapat dipandang sebagai dua sumber inspirasi bagi transformasi Islam di Indonesia: Islam yang beretika, terbuka, dan beradab.¹⁶

Kedua tokoh ini juga memberikan pelajaran etika bagi generasi masa kini. Hasan mengingatkan bahwa bangsa tanpa nilai-nilai spiritual akan kehilangan orientasinya, sementara Soekarno mengingatkan bahwa agama tanpa dimensi kemanusiaan akan kehilangan hakikatnya.¹⁷ Dalam dunia yang semakin pragmatis, gagasan mereka menjadi pengingat akan pentingnya menyeimbangkan antara iman dan kemanusiaan, antara ketaatan kepada Tuhan dan tanggung jawab sosial terhadap sesama.¹⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ahmad Hasan dan Sukarno tidak hanya berkontribusi pada pembentukan diskusi tentang Islam dan nasionalisme pada masanya, tetapi juga tetap relevan dalam membangun kesadaran beragama dan berbangsa di Indonesia modern.¹⁹ Mereka menegaskan bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang saling memperkaya, menciptakan masyarakat yang adil, beriman, dan beradab.²⁰

KESIMPULAN

Dari perjumpaan pemikiran Ahmad Hasan dan Soekarno, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah jurang yang memisahkan, melainkan jembatan yang memperkaya cara pandang manusia terhadap kebenaran. Hasan dan Soekarno menempuh jalan yang berbeda, namun keduanya bertemu pada satu titik yang sama: keinginan untuk menjadikan Islam sebagai sumber kekuatan moral dalam membangun manusia dan bangsa.

Ahmad Hasan mengingatkan bahwa bangsa tanpa nilai spiritual akan kehilangan arah; Soekarno menegaskan bahwa agama tanpa keberpihakan pada kemanusiaan akan kehilangan makna. Keduanya mengajarkan bahwa iman tidak berhenti di ruang ibadah, dan nasionalisme tidak boleh buta terhadap nilai-nilai ketuhanan. Dari situ lahir gagasan besar bahwa menjadi Muslim dan menjadi Indonesia bukan dua identitas yang bertentangan, melainkan dua panggilan yang saling melengkapi.

Dalam konteks Indonesia modern yang terus berhadapan dengan arus pragmatisme, intoleransi, dan krisis moral, pemikiran keduanya tetap menjadi cahaya yang relevan. Dari Hasan, kita belajar tentang kejujuran iman dan keberanian menjaga prinsip. Dari Soekarno, kita belajar tentang kebijaksanaan melihat keberagaman sebagai rahmat. Keduanya mewariskan pelajaran abadi bahwa peradaban yang besar tidak dibangun oleh keseragaman pandangan, tetapi oleh kesediaan untuk berdialog dengan perbedaan.

Akhirnya, penelitian ini hendak menegaskan bahwa tugas intelektual bukan sekadar mencari siapa yang paling benar, tetapi menemukan nilai yang memanusiakan. Seperti halnya Hasan dan Soekarno, kita pun dipanggil untuk terus menyalakan api pengetahuan yang mempersatukan iman, nalar, dan kemanusiaan karena hanya bangsa yang mau belajar dari perbedaanlah yang akan menemukan makna sejati dari kemerdekaan.

Keterbatasan berfikir mengajak para pembaca untuk tidak henti hentinya dalam menelaah suatu permasalahan dalam satu sudut pandang saja, kendati demikian kita sebagai orang yang terpelajar di haruskan untuk selalu waspada dalam mengambil suatu putusan dan kesimpulan layaknya Soekarno dan Ahmad Hasan. Dalam bukunya Ahmad Hasan menyinggung keras bagaimana cara Soekarno mengartikan tentang kebangsaan dan kenegaraan, disisi lain Soekarno pun menginginkan unsur-unsur daripada agama agar menjadi karet sehingga turut ikut landasan yang di gagas kawan kawan nasionalisme.

Dengan kekakuan yang di ciptakan oleh Ahmad Hasan agama dan negara berusaha terarah pada satu contoh nyata yaitu turki ustmani, yang notabene turki gagal dalam melindungi kekuatan islam dari dalam dan luar yang mengakibatkan hancurnya kekuatan islam internasional.

Soekarno dengan ideologi sekuleris nya berupaya ingin sekali memisahkan antara agama dan negara supaya memberikan kuasa penuh terhadap negara dan memberikan singgah sana yang maha kuat di dalam kalbu umat nya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hasan. *Islam dan Kebangsaan*. Bandung: Pustaka, 1950.

Asef Bayat. *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.

Rahardjo, M. Dawam. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Jakarta: Paramadina, 1991.

Ridha, Rashid. *Al-Manar Journal*. Cairo: Dar al-Manar, 1922.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2008.

Soekarno. *Api Islam*. Jakarta: Panitia Penerbit, 1965.

Dibawah Bendera Revolusi, Vol. 1. Jakarta: Panitia Penerbit, 1965.

Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Surabaya: HB Jassin, 1926.